

EVALUASI EFEKTIVITAS KINERJA DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI KEMISKINAN SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 DI KOTA MALANG

Alisya Tri Ananda¹, Nadhifa Tri Rahmadina², Nur Maimunah³, Hayat⁴
alisyat334@gmail.com¹, nadhifarahmadina@gmail.com², nurmaimunah2805@gmail.com³,
hayat@unisma.ac.id⁴
Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kinerja Dinas sosial Dalam Menangani Kemiskinan Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19 di KOTA MALANG. Dinas Sosial Kota Malang merupakan unsur perangkat daerah yang mengatur masalah kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan sosial yang adil dan makmur bagi seluruh masyarakat, dimana setiap warga negara dapat hidup layak dan bebas dari kemiskinan untuk itu penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana penduduk mengalami kekurangan akses terhadap kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Penelitian ini dilakukan pada bulan mei dan dilakukan di kantor dinas sosial malang yang bertempat di Jl. Ki Ageng Gribig No.5 dengan data primer dari penelitian ini didapat dari wawancara untuk data sekunder didapat dari website resmi Pemerintah Kota Malang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Dinas Sosial Kota Malang bergerak maju dalam memerangi kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan sosial. Terdapat 3 program atau kegiatan yang meliputi bantuan sosial pemenuhan kebutuhan bagi lanjut usia, bantuan kebutuhan dasar fakir miskin, dan bantuan RASDA dari ketiga program tersebut bisa disimpulkan bahwa evaluasi dari kinerja Dinas Sosial setelah Pandemi Covid-19 perlu mempertimbangkan respon cepat dan adaptasi terhadap permasalahan publik, seperti Covid-19.

Kata kunci: Dinas Sosial Kota Malang, Kemiskinan, Evaluasi Kinerja.

PENDAHULUAN

Dinas Sosial Kota Malang adalah lembaga daerah yang bertanggung jawab untuk mengatasi kemiskinan. Ini adalah bagian dari perangkat daerah yang menangani masalah kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan sosial yang adil dan makmur bagi seluruh masyarakat, yang memungkinkan setiap orang hidup dengan layak dan bebas dari kemiskinan. Sejalan dengan tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Malang, yaitu mewujudkan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) yang sejahtera dan berkemampuan. Fungsi utama pemerintah adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat [1].

Kemiskinan adalah salah satu penyebab penyandang masalah kesejahteraan masyarakat di kota Malang. Proses pembangunan Indonesia menghadapi masalah kemiskinan yang signifikan. Penanganan kemiskinan prioritas utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinas sosial salah satu Lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap program - program sosial, memainkan peran krusial dalam merancang dan melaksanakan kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan. Pernyataan badan pusat statistik (BPS) Kota Malang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Malang berjumlah 40,62% dari total penduduk, yang menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan sosial meningkat sebagai akibat dari tingkat

kesejahteraan masyarakat yang rendah [2]

Adanya Pandemi COVID-19 di empat tahun terakhir ini yang melanda dunia pada tahun 2019 hingga 2021. Dimana Pandemi telah mengakibatkan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan dalam permasalahan tersebut termasuk ekonomi dan kesejahteraan sosial. Di Indonesia Pandemi memperburuk kondisi Kemiskinan dengan meningkatnya jumlah penganggur dan menurunnya pendapatan masyarakat. Hasil riset menyebutkan dampak paling ringan yang disebabkan pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi akan sangat meningkatkan tingkat kemiskinan, seperti yang dikatakan kepala BPS kota Malang bahwa kemiskinan yang terjadi pada kota Malang ini sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, yang berdampak terhadap perekonomian. Hal ini menjadi tugas berat dinas sosial sebagai pelaksana otonomi daerah dalam penanganan di bidang sosial[3].

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin , seseorang dianggap fakir miskin jika mereka sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian atau memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup atau keluarga mereka. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa seseorang yang dikategorikan fakir miskin hidup dalam kondisi yang memprihatinkan karena kebutuhan dasar, tempat tinggal, pakaian, kebutuhan udara bersih, dan makanan tidak terpenuhi dengan baik, sehingga menjalankan hidup kurang layak, dan kebutuhan dasar, tempat tinggal, pakaian, kebutuhan air bersih dan makanan tidak terpenuhi dengan baik sehingga dalam menjalankan hidup kurang layak, dan kebutuhan dasar yang dimaksud tadi ialah kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan sosial [4].

Fungsi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan masyarakat bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya untuk mencapai tujuan bangsa yang dinamakan dalam UUD RI 1945 pada sila kelima Pancasila yang menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perkembangan penduduk yang membawa permasalahan baru, salah satunya permasalahan kemiskinan yang tersebar di kota Malang. Oleh karena itu, Penelitian ini didasarkan pada tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Kota Malang, yang menyebabkan banyak orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial belum menerima hak atas kesejahteraan masyarakat secara merata.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2020:9), metode penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data dilakukan secara induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi, menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020:7). Penelitian ini dilakukan pada bulan mei dan dilakukan di kantor dinas sosial malang yang bertempat di Jl. Ki Ageng Gribig No.5. Sumber data dari penelitian ini berupa data primer, menurut Umar (2003:56) data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan, data primer dari penelitian ini didapat dari wawancara. Dan untuk sumber data sekunder, menurut Sugiyono (2013:62) data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Dalam penelitian ini penulis cenderung mendapatkan data sekunder dari

web resmi dinas sosial kota malang, web pemerintahan, dan media lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, ada banyak metode untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, ada sedikit empat metode pengumpulan data dengan berbagai metode, menurut Mc. Millan dan Schumacher dalam *Research in Education: Sebuah Pengantar Konseptual*. menggunakan observasi partisipatif, wawancara menyeluruh, penelitian literatur, dan pemeriksaan artefak. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data kualitatif. Menurut Esterberg (2013:231), wawancara adalah pertemuan di mana dua orang berkumpul untuk berbagi ide dan informasi melalui tanya jawab, yang memungkinkan terciptanya makna tentang topik tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan kemiskinan sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19 di kota Malang

Penilaian kemiskinan melibatkan berbagai sektor yang mencerminkan kondisi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa faktor bisa dinilai dalam mengukur kemiskinan termasuk pengeluaran perkapita, garis kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Penilaian ini penting untuk memahami sejauh mana penduduk mengalami kekurangan akses terhadap kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Perbandingan antara tahun membantu dalam mengidentifikasi efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2019, selama pandemi COVID-19, angka kemiskinan di Kota Malang berada pada level Rp 543.966 per kapita per bulan, meningkat sekitar 36,8 ribu rupiah dibandingkan Garis Kemiskinan pada tahun 2018. Orang-orang yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dianggap sebagai penduduk miskin. Meskipun ada peningkatan garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Kota Malang justru berkurang sekitar 100 orang, dari 35,49 ribu orang, yang merupakan 4,10 (persen dari total penduduk) pada tahun 2018 menjadi 35,39 ribu orang (4,07 persen) pada tahun 2019. Dan di tahun 2019 ini, kemiskinan menginjak angka persentase 4,07 persen. Dengan begitu, untuk di wilayah Klojen khususnya Rampal Celaket dan Samaan pun mengalami penyusutan angka kemiskinan pada tahun 2019. Kelurahan samaan jumlah angka kemiskinan mencapai 1576 dan kelurahan Rampal Celekat jumlah angka kemiskinan mencapai 1201. Sedangkan pada tahun 2020 kelurahan Samaan dan Rampal Celaket di awal pandemik COVID-19 garis kemiskinan kota Malang berada pada level Rp 554.791,- per kapita per bulan atau meningkat sangat pesat sekitar 10,8 ribu rupiah dibanding Garis Kemiskinan pada tahun 2019. Dengan begitu, kemiskinan di kota Malang khususnya di Samaan dan Rampal Celaket di tahun 2020 mengalami kenaikan. Dengan meningkatnya persentase penduduk miskin, rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ini terlihat dari Indeks Kemiskinan (P1) Kota Malang yang pada tahun 2019 sebesar 0,55 naik menjadi 0,66 pada tahun 2020. Dalam setahun terakhir tingkat kemiskinan di kota Malang mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen poin menjadi 4,44 persen pada tahun 2020. Jumlah penduduk miskin kota Malang naik sekitar 3,38 ribu orang dari 35,39 ribu orang (4,07 persen dari total penduduk) pada tahun 2019 menjadi 38,77 ribu orang (4,44 persen) pada tahun 2020. untuk di kelurahan Samaan dan kelurahan Rampal Celaket data kemiskinan masih sama seperti pada tahun 2019. Tidak ada kenaikan kemiskinan yang terlihat secara signifikan. Untuk jumlah kemiskinan di tahun 2019 dan 2020[10].

Berbeda pada tahun 2021, tahun kedua terjadinya pandemik, Garis Kemiskinan kota Malang berada pada level Rp 570.238,-per kapita per bulan atau meningkat sekitar 15,4 ribu rupiah dibanding Garis Kemiskinan pada tahun 2020. Jumlah penduduk miskin di

Kota Malang tahun 2021 mencapai 40,62 ribu jiwa (4,62 persen), bertambah sebesar 1,85 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi 2020 yang sebesar 38,77 ribu jiwa (4,44 persen). Kenaikan persentase penduduk miskin juga mengakibatkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2021 ini, kemiskinan mencapai puncak tertinggi kedua selama satu dekade setelah tahun 2011. Kemiskinan juga bertambah pesat di kelurahan samaan dan rampal celaket.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan selama periode 2020-2021, antara lain adalah:

- a. Situasi saat ini terkait pandemi COVID 19 masih terjadi
- b. Selama periode 2020 – 2021 terjadi inflasi sebesar 1,26 persen
- c. Selama periode 2020 – 2021 banya komoditi makanan dan non makanan

mengalami perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Dimana IHK pada tahun 2020 berada pada angka 101,7 mengalami kenaikan sekitar 2,45 persen poin menjadi 104,16 pada tahun 2021. Kegunaan adanya IHK ini berfungsi untuk mengukur dan menghitung harga keseluruhan dari barang/jasa yang dianggap menunjukkan belanja rumah tangga dan akan dihitung rata ratanya. Dan yang terakhir pada tahun 2022. Di tahun ini, pandemi mulai mereda dan dengan begitu, permasalahan fakir miskin sedikit tertuntaskan dan sedikit berjalan lebih normal. Dimana jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan) di tahun 2022 mencapai 38,56 ribu jiwa. Jumlah ini turun sebesar 2,06 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yaitu sebesar 40,62 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kota Malang juga turun dari 4,62% pada tahun 2021 menjadi 4,37% pada tahun 2022. Hal ini tentunya merupakan pencapaian positif, dari empat tahun terakhir setelah terjadinya kemiskinan kronis.

Faktor faktor berikut dapat menyebabkan kemiskinan pada tahun 2021–2022:

- a. Setelah pandemi COVID-19, kondisi Kota Malang mulai kembali normal.
 - b. Kembalinya ekonomis, meski belum lengkap sepenuhnya.
 - c. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1 poin, atau dari 9,65% pada Agustus 2021 menjadi 7,66% pada Agustus 2022.
 - d. Turunnya tingkat kemiskinan dicapai secara positif melalui pelaksanaan Program Bantuan Sembako (BPNT) yang tepat waktu, terutama selama pandemi COVID -19.
2. Strategi kinerja dinas sosial dalam menangani kemiskinan di kota Malang

Tercatat pada tahun 2022 lalu data kemiskinan kota Malang berada di angka 4,37 persen. Dan target di tahun 2023 bisa turun menjadi 3,77 persen. Upaya yang dilakukan oleh dinas sosial dalam menangani kemiskinan di kota Malang ini. Yang pertama adalah pemberian bantuan pangan non tunai daerah (BPNTD) senilai Rp. 150.000,00, yang diberikan dalam bentuk beras 10 kg dan telur 10 butir. Jumlah ini meningkat dari BPNTD sebelumnya senilai Rp. 125.000,00 pada tahun 2022. Yang kedua menjalankan program rantang kasih secara teratur dan masif untuk membantu orang tua yang tidak produktif atau tidak dapat melakukan aktivitas normal untuk menghidupi dirinya. Yang ketiga adalah memberikan bantuan kepada mereka yang memiliki disabilitas. Ini dapat mencakup pemberian alat bantu tubuh atau program indra, seperti alat bantu dengar. Yang keempat terkait dengan program keluarga harapan, yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lebih dari 9.000 PKM menerima bantuan sosial PKH di kota Malang.

Tingginya angka kemiskinan di kota Malang, proses pengurangan angka kemiskinan ini menjadi prioritas utama di setiap wilayah Indonesia. Dalam konteks tingginya angka kemiskinan diperlukan adanya penurunan angka kemiskinan di kota Malang yang sampai saat ini mencapai 4,7%

Dinas Sosial Kota Malang

bergerak maju dalam memerangi kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan sosial. Terdapat 3 program atau kegiatan dari Dinas Sosial Kota Malang yang telah menunjukkan hasil positif dalam membantu kelompok rentan di Kota Malang, yaitu:

1. Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi lanjut usia terlanter/ tidak potensial dan penyandang disabilitas. Program ini menargetkan lansia terlanter/tidak potensial dan penyandang disabilitas dengan memberikan bantuan sembako. Jumlah PMKS lanjut usia terlanter/ tidak potensial dan penyandang disabilitas yang diberi bantuan sembako
2. Bantuan Kebutuhan Dasar Fakir Miskin. Program ini berfokus pada penyediaan kebutuhan dasar bagi keluarga pra sejahtera. Persentase Fakir Miskin Mendapatkan Bantuan Kebutuhan Dasar pada tahun 2023 sebanyak 8,05%.
3. Pembagian RASDA. Persentase keluarga miskin yang mendapatkan beras dari total jumlah keluarga pra sejahtera sebanyak 6819 KK

Dari ketiga program diatas terdapat target dan capaian dari masing-masing program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan. Secara keseluruhan, target pencapaian hasil program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Malang pada tahun 2019-2023 tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi kemiskinan telah menunjukkan hasil yang positif.

Implementasi teori skema kompensasi dalam penanganan kemiskinan, prinsip-prinsip dari teori Aguinis dapat diterapkan dalam penanganan kemiskinan dengan memastikan bahwa program-program bantuan sosial yang dijalankan oleh dinas sosial transparan, adil, dan sesuai dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan. Transparansi dalam penyaluran bantuan, keadilan dalam distribusi sumber daya, dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat miskin sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program tersebut.

1. Transparansi:

- Program BPNT: Pemberian bantuan pangan seperti beras dan telur dilakukan secara terbuka. Penerima bantuan mengetahui kriteria dan mekanisme distribusi, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan terhadap program.
- rogram Rantang Kasih: Penjelasan yang jelas tentang siapa yang berhak menerima bantuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

2. Keadilan:

- Bantuan untuk Disabilitas: Memberikan alat bantu secara merata kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebutuhan membantu mengurangi ketidakadilan.
- Program Keluarga Harapan (PKH): Distribusi bantuan sosial berdasarkan kriteria yang jelas dan adil memastikan bahwa keluarga miskin menerima bantuan yang layak.

3. Kesesuaian dengan Tujuan:

- BPNT: Fokus pada kebutuhan dasar pangan membantu mengurangi kelaparan, sesuai dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan.
- Bantuan Kebutuhan Dasar Fakir Miskin: Program yang menyediakan kebutuhan dasar untuk keluarga miskin memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi, membantu mengurangi angka kemiskinan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Sebelum pandemi COVID-19, evaluasi kinerja Dinas Sosial dalam menangani kemiskinan di Kota Malang mungkin mencakup upaya-upaya seperti program bantuan sosial, dan lain sebagainya. Kemungkinan besar terdapat berbagai program yang telah dilaksanakan dengan beragam tingkat keberhasilan. Namun, dengan adanya pandemi

COVID-19, situasinya kemungkinan berubah secara signifikan. Dampak ekonomi dari pandemi mungkin telah meningkatkan jumlah penduduk yang memerlukan bantuan sosial dan kemungkinan juga mengubah profil kemiskinan di Kota Malang. Dalam konteks ini, evaluasi kinerja Dinas Sosial setelah pandemi perlu mempertimbangkan respon cepat dan adaptasi program-program yang ada untuk sesuaikan dengan kebutuhan baru masyarakat yang terdampak. Karena terdapat faktor yang mempengaruhi kemiskinan selama periode 2020-2021, ialah, situasi pandemi COVID 19 masih terjadi, selama periode 2020 – 2021 terjadi inflasi sebesar 1,26 persen, selama periode 2020 – 2021 banyak komoditi makanan dan non makanan mengalami perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Selain itu, kondisi Kota Malang setelah pandemi COVID-19 yang menjanjikan-angsur kembali normal merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan selama tahun 2021 dan 2022. Perekonomian telah pulih, namun belum sepenuhnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 1 poin, atau dari 9,65% pada Agustus 2021 menjadi 7,66% pada Agustus 2022. Tingkat kemiskinan berkurang secara positif karena penyaluran Program Bantuan Sembako (BPNT) yang tepat waktu, terutama selama pandemi COVID-19. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, terdapat program-program yang memiliki target dan capaian dari masing-masing program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan. Secara keseluruhan, target pencapaian hasil program tersebut penanggulangan kemiskinan di Kota Malang pada Tahun 2019-2023 tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi kemiskinan telah menunjukkan hasil yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Toyyibul Fikri dan R. Wulan Sekarsari, “EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM MENEKAN ANGKA PENGEMIS DI KOTA MALANG (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Malang),” vol. 17, no. 9, hal. 11–21, 2023.
- [2] Z. Solichah, H. Alrasyid, dan A. Taqwiem, “KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DAN UMKM SELAMA MASA PANDEMI COVID-19,” vol. 4, no. 1, hal. 518–530, 2023.
- [3] Y. Yuliana, I. Isabella, dan D. Febriyanti, “Kinerja Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Palembang,” JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sos. Ilmu Polit. Univ. Jambi), vol. 6, no. 2, hal. 1–11, 2022, doi: 10.22437/jisipunja.v6i2.20234.
- [4] T. Murwadi, “Jurnal Hukum POSITUM,” J. Huk. positum, vol. 3, no. 1, hal. 19–36, 2016.
- [5] Kusnadi et al., “Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak Dalam Menangani Pengemis Di Kota Pontianak,” PUBLIKA-Jurnal Ilmu ..., 2019, [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.fisipuntan.org/index.php/publika/article/view/1567%0Ahttps://jurnal.fisipuntan.org/index.php/publika/article/download/1567/1517>
- [6] N. F. Sari dan H. T. Rfs, “Kinerja Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Fakir Miskin),” J. Ilm. Wahana Pendidik., vol. 9, no. 18, hal. 533–540, 2023.
- [7] A. Y. Pratama, “Kinerja aparatur dinas sosial dalam mengurangi angka kemiskinan di kota banda aceh provinsi aceh,” hal. 1–11.
- [8] M. iqbal Abdul Muin dan S. A. Lubis, “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi,” J. Pemberdaya. Masy., vol. 8, no. 1, hal. 92, 2020, doi: 10.37064/jpm.v8i1.7528.
- [9] N. Stocks, “濟無No Title No Title No Title,” hal. 1–23, 2016.
- [10] M. Murdiyana dan M. Mulyana, “Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia,” J. Polit. Pemerintah. Dharma Praja, vol. 10, no. 1, hal. 73–96, 2017, doi: 10.33701/jppdp.v10i1.384.